

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan tolak ukur pembangunan nasional. Sektor ekonomi selalu menjadi fokus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun panjang. Bahkan setelah masalah krisis terlewati, perbaikan ekonomi selalu menjadi prioritas utama. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya serta terbentuknya keterkaitan antar pelaku usaha yang mencakup usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan, dorongan, dukungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai pemihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan usaha besar.

Ditengah iklim kebijakan yang diskriminatif di era orde baru dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih menunjukkan daya tahan yang cukup mengagumkan. Sektor UMKM ini mampu bertahan menjawab tantangan dan menjadi andalan, di saat usaha skala besar dan sektor lainnya terpuruk.

Salah satu sektor yang masih dapat diandalkan bahkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat adalah sektor perikanan.

Sektor ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun yang berorientasi ekspor masih mampu memberikan keuntungan, karena dapat menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, memberikan nilai tambah ekonomis dan memberikan kesempatan kerja. Oleh karena itu Jawa Barat mulai terfokus pada sektor perikanan dan kelautan ini.

Di Jawa Barat terdapat 68 PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), 6 pelabuhan perikanan pantai, dan 2 pelabuhan perikanan nusantara. Selama ini 45 % suplai ikan untuk kebutuhan di Provinsi Jawa Barat dipasok nelayan Indramayu. Jabar memberikan bantuan Rp 3,170 miliar untuk pengembangan PPI Karangsong Indramayu. Bantuan ini diberikan bagi akselerasi sektor perikanan di Indramayu. Bantuan ini diberikan agar PPI Karangsong dapat menjadi PPI terbesar, bukan saja di Indramayu, tetapi juga di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merencanakan untuk membangun atau sekadar merenovasi PPI lain sepanjang pesisir utara maupun pesisir selatan Jawa Barat.

Bagi masyarakat Indramayu, sektor perikanan dan kelautan merupakan program utama, bukan semata program pinggiran. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu tahun 2004, produksi sektor perikanan Indramayu mencapai 27.000 ton dengan nilai Rp 77,7 miliar. Jumlah ini baru 44 % dari total potensi perikanan tangkap sebesar 61.000 ton per tahun. Dengan bentang pantai mencapai 114 kilometer (terpanjang di Jabar), saat ini Indramayu memiliki tiga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu PPI Karangsong, PPI Dadap, dan PPI Eretan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Darsono (2004:1) mengatakan, “akselerasi pembangunan PPI Karangsong melalui dana dari APBN dan APBD diharapkan dapat membantu sektor perikanan di Indramayu”. Di lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong mulai tertata sarana fisik seperti tempat pelelangan ikan permanen, stasiun pengisian solar yang berlokasi tepat di tepi kali, lapangan parkir, masjid, dan kios-kios. akibat musim hujan, aspal hancur sehingga sebagian wilayah TPI Karangsong dipenuhi lumpur. Sektor perikanan telah membuktikan sebagai jangkar perekonomian kabupaten ini.

Berdasarkan perhitungan dari BPS tahun 2005, jumlah nelayan di Kabupaten Indramayu yang melakukan penangkapan ikan sebanyak 32.556 orang dengan jumlah rumah tangga perikanan (RTP) sekitar 3.265 unit. Dari jumlah nelayan itu, yang mendesak untuk ditingkatkan kemampuannya mencapai 20.000 nelayan, sehingga tidak berlebihan bila dimasa mendatang Indramayu membutuhkan 1.000 unit kapal ikan ukuran besar. Oleh karena itu Indramayu membutuhkan kapal yang tidak sedikit, untuk satu unit kapal dengan ukuran 30 GT diperlukan dana paling tidak Rp. 1 Miliar. Dengan demikian dibutuhkan dana sekitar Rp. 1 Triliun bagi pengadaan 1000 unit kapal

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Indramayu Tahun 2006, dalam sehari rata-rata 10-11 kapal motor berbobot 20-28 gross ton berlabuh di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangsong yang merupakan PPI terbesar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Indramayu memerlukan 1.000 unit kapal ikan ukuran 30 GT

atau lebih. Sementara saat ini, jumlah armada kapal ikan mencapai 4.161 unit, dari jumlah itu hanya 283 unit yang merupakan kapal ikan ukuran besar diatas 30 GT.

Kinerja pengusaha ikan Kabupaten Indramayu Kecamatan Karangsong ini dapat dilihat dari dua kategori yaitu pertama dilihat dari besarnya laba yang diperoleh oleh pengusaha ikan dan produksi penangkapan ikan setiap bulannya. Laba dan hasil penangkapan ikan pengusaha sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain musim, jenis ikan, serta lokasi pendaratan dan penangkapan ikan. Di Pantai Utara Jawa (Pantura) misalnya pada saat musim barat yaitu bulan September sampai dengan bulan Februari ketika ombak di laut relatif besar, umumnya hasil tangkapan ikan relatif sedikit karena hanya beberapa kapal nelayan saja yang melaut. Kadaan ini mengakibatkan harga cenderung naik karena pada satu sisi volume hasil tangkapan berkurang dan permintaan relatif tetap atau meningkat. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan April memiliki harga tinggi yang mencapai lima kali dari harga terendah. Hal ini dapat dilihat dari perolehan laba pengusaha ikan setiap bulannya.

Laba Usaha Rata-Rata Yang Diperoleh Tiap Bulan

No.	Laba (Rp)	Frekuensi	%	Kategori
1.	< 100 Juta	7	10,78	Sangat kecil
2.	101 Juta - 200 Juta	29	44,62	Kecil
3.	201 Juta - 300 Juta	13	20	Sedang
4.	301 Juta - 400 Juta	11	16,91	Besar
5.	> 401 Juta	5	7,69	Sangat besar
	Jumlah	65	100	

Sumber: Diolah dari hasil angket

Dari tabel di atas diketahui laba pengusaha ikan per bulan rata-rata sebanyak 44,62% sehingga dikategorikan kecil, sedangkan pengusaha ikan yang memperoleh laba rata-rata perbulan sebanyak 7,69% yaitu dikategorikan sangat besar karena tiap bulan pengusaha ikan itu menghasilkan laba lebih dari Rp.400 juta perbulan masih terbilang cukup rendah. Setelah ditelaah melalui pengamatan yang dilakukan penulis baik dilapangan maupun dari data-data yang tersedia ternyata masalah tersebut disebabkan adanya beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya kurangnya modal, kurang terciptanya pembinaan usaha dan kurang adanya kerjasama dengan pihak terkait seperti bank-bank pemerintah. Sedangkan produksi penangkapan ikan tiap bulannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Produksi Penangkapan Ikan Tiap Bulan

No.	Produksi Ikan	Frekuensi	%	Kategori
1.	< 1 Ton	13	20	Sangat kecil
2.	2 Ton	25	38,46	Kecil
3.	3 Ton	15	23,08	Sedang
4.	4 Ton	7	10,77	Besar
5.	> 4 Ton	5	7,69	Sangat besar
	Jumlah	65	100	65

Sumber: Diolah dari hasil angket

Produksi tangkapan ikan per bulan sebagian besar sebanyak 38,46% dikategorikan kecil dimana pengusaha ikan dapat menghasilkan produksi tiap bulan sebanyak 2 ton dan sisanya 7,69% produksi yang dihasilkan lebih dari 4 ton dikategorikan sangat besar. Hasil tangkapan ikan ini tergantung dari kondisi alam/cuaca yang terjadi.

Pengusaha ikan menggunakan sistem bagi hasil, artinya suatu sistem yang berlaku untuk membagi uang antara juragan pemilik perahu (pengusaha) dengan punggawa sebagai pelaksana dalam usaha penangkapan ikan di laut. Juragan (pengusaha ikan) memperoleh setengah bagian dan setengah bagian lagi untuk nelayan (sistem maroh). Jumlah uang yang dibagikan antara juragan dan bidak diambil setelah dikurangi biaya operasional. Modal yang dipinjam oleh nelayan harus dibayar dari jualan ikan hasil tangkapannya. Apabila hari itu tidak mendapatkan ikan, utang nelayan dibayar pada hari berikutnya. Pada musim paceklik banyak nelayan yang tidak mampu membayar utangnya, dan akan dibayar ketika musim panen.

Mubyarto mengelompokkan “nelayan ke dalam lima strata sosial, yaitu 1) nelayan kaya A; 2) nelayan kaya B; 3) nelayan sedang; 4) nelayan miskin dan 5) nelayan pandega atau tukang kiteng buruh perikanan” (Mubyarto,2006:16). Nelayan kaya A sebagai juragan (pengusaha) yang mempunyai kapal, mempekerjakan nelayan lain sebagai pandega, tanpa ia sendiri ikut bekerja; sedangkan nelayan B mempunyai kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal. Nelayan sedang memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga, kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dari pendapatan pokoknya sebagai nelayan. Nelayan miskin, pendapatan perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan sumber dari pekerjaan lain olehnya sendiri atau anak-anaknya. Nelayan pandega atau tukang kiteng buruh perikanan, yang penghasilannya hanya mengharapkan dari upah hasil tangkapannya.

Nelayan miskin dan pandega hampir di setiap desa jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kelompok nelayan lain. Hal inilah yang sering menyebabkan munculnya gambaran bahwa masyarakat nelayan itu identik dengan kemiskinan, bahkan dibandingkan dengan petani dan buruh tani sekalipun, nelayan itu masih lebih miskin. Padahal tujuan pembangunan sub sektor perikanan yang mendasar adalah meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan menuju swasembada pangan (protein hewani) dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat Indonesia dan memajukan kualitas kehidupan masyarakat perikanan. Tidak menentunya penghasilan dan peralatan yang digunakan nelayan tidak dapat mengatasi gejala alam yang sedang tidak bersahabat, padahal kebutuhan keluarga harus tetap disediakan. Pada musim panen, karena terbatasnya permintaan pasar, menyebabkan ikan laut harus diawetkan. Padahal nilai ekonomi ikan yang diawetkan lebih rendah dibandingkan dengan ikan segar.

Kondisi sosial ekonomi nelayan seperti itu menyebabkan nelayan Indonesia sebagian besar tergolong sebagai nelayan tradisional, yaitu nelayan yang masih menggunakan perahu dan peralatan tradisional, sehingga kendala yang berasal dari alam sering tidak bisa diatasi. Hal ini menyebabkan penangkapan ikan menjadi tidak menentu.

Umar (2006:1) menjelaskan bahwa “untuk meningkatkan kemampuan usaha penangkapan, dibutuhkan armada kapal ikan yang besar”. Hal ini diperlukan untuk menjangkau daerah penangkapan yang lebih jauh, karena perairan Pantai Indramayu



sudah jenuh dengan kondisi lingkungan yang rusak. Jika mengandalkan ikan di sekitar perairan pantai, jelas kurang pendapatan, karena jumlah tangkapan tidak memenuhi target. Para pengusaha berharap agar pemerintah sungguh-sungguh dalam membantu usahanya. Terdapat sejumlah program pembangunan perikanan, seperti kredit perikanan, namun hingga kini para pengusaha belum mendapatkan fasilitas kredit tersebut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha ikan Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu ini antara lain seperti: 1) kesulitan dalam memperoleh kredit, banyak pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu ini yang tidak tahu prosedur kredit di bank dan banyak pengusaha yang tidak mempunyai jaminan yang lebih besar untuk mendapatkan kredit yang diinginkannya; 2) keterbatasan modal, faktor modal yang dimiliki pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu menjadi kendala, karena setiap pengusaha ikan harus menyediakan modal untuk produksi dan biaya-biaya lainnya seperti gaji karyawan, biaya untuk perbekalan dan kebutuhan untuk nelayan yang akan pergi melaut seperti perahu, jaring, bahan bakar dan kebutuhan untuk makan selama beroperasi, semua kebutuhan tersebut dan kebutuhan-kebutuhan lainnya; 3) sumber daya manusia yang rendah (terutama manajemen dan teknisi produksi) menyebabkan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sehingga menghambat menerima transfer teknologi serta penggunaan peralatan modern; 4) kesulitan dalam pemasaran, kekurangan informasi yang akurat dan *up to date*

mengenai peluang-peluang pasar di dalam maupun luar negeri dan peraturan-peraturan mengenai tata niaga pemasaran regional atau internasional merupakan suatu penghambat bagi banyak pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu untuk menembus pasar global atau meningkatkan atau paling tidak untuk mempertahankan pangsa pasar ekspornya, pengusaha ikan ini banyak yang belum benar-benar paham tentang caranya mengekspor ke luar negeri; 5) serta keterbatasan teknologi, rendahnya penguasaan/pemilikan teknologi modern yang dimiliki pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.

Dilain pihak kendala alam/cuaca merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha ikan, upaya pemerintah melalui program motorisasi sebagai hasil dari pembangunan nasional di bidang perikanan. Meskipun pemerintah telah membantu para pengusaha dalam mengatasi kendala alam/cuaca tampaknya masih belum mampu mengatasi persoalan alam yang dihadapinya. Usaha perikanan ini termasuk salah satu jenis usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang diambil saat ini adalah melalui upaya pendampingan maupun pemberian bantuan teknis. Terkait dengan permasalahan tersebut, BI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terus berupaya mengambil peran secara aktif dengan mengambil berbagai kebijakan. Kredit merupakan salah satu upaya perbankan dalam penyebaran risiko perbankan, sementara suku bunga kredit disesuaikan dengan tingkat bunga pasar sehingga bank mempunyai margin yang cukup. SDM yang relatif rendah dapat diatasi dengan



memberikan pendidikan dan latihan secara langsung kepada para pengusaha dan tenaga kerja, pendidikan dan latihan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan agar efektifitas pendidikan dan latihan dapat terjamin serta perlu mendapatkan penanganan yang serius baik yang menyangkut sarana maupun prasarana, meningkatkan kemampuan dan keahlian para pekerja, menempatkan tenaga kerja secara benar dan sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalamannya masing-masing sangat penting dan ini merupakan cara yang paling efektif. Oleh karena itu peran pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan maupun tenaga kerja sangat dibutuhkan.

Pengumpulan informasi pasar dilakukan, terutama untuk mengetahui tipe produk (ikan hidup, ikan segar, atau ikan olahan), ukuran, jumlah, harga, waktu, mekanisme distribusi dan pelayanan yang dikehendaki oleh konsumen terhadap produk, dapat meningkatkan kualitas produk agar tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga, produsen perikanan dituntut untuk dapat menyediakan produk perikanan yang sesuai dengan selera pasar, para pengusaha yang mengekspor produk perikanan juga harus memperhatikan berbagai isu yang terkait langsung dengan produk.

Para tenaga kerja (bidak) harus bisa mempelajari dan menggunakan teknologi modern yang akan dipergunakan, hal ini diperlukan untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh para tenaga kerja dan dapat mempersingkat waktu cara pengerjaannya sehingga para tenaga kerja dapat

menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan memiliki pengetahuan tentang cara penggunaan alat yang tepat.

Kredit perbankan yang terjadi di Indonesia, penulis juga memaparkan tentang kredit perbankan yang terjadi di Jawa Barat. Di Tabel 1.1 dijelaskan bahwa kredit bermasalah yang terjadi di kota Bandung menunjukkan nilai NPL (*Non Performing Loan*) tertinggi yaitu 1,666,017 (6,67%) diantara yang lainnya sedangkan Kab. Majalengka memiliki nilai kredit bermasalah terendah yaitu 563 (0,18%). Bahkan Kabupaten Indramayu memiliki nilai kredit bermasalah (NPL) sebanyak 21.540 (3,09%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 DPK, Kredit dan NPLS Kabupaten/kota di Jawa Barat (Rp. Juta)

Kabupaten/Kota	DPK	Kredit	LDR	NPL	
				Nominal	%
Kab. Tasikmalaya	88,020	219,008	248,82	16,816	7.68
Kab. Majalengka	131,887	312,621	237.04	563	0.18
Kab. Ciamis	181,322	384,153	211.86	7,290	1.90
Kab. Kuningan	242,737	367,864	151.55	3,426	0.93
Kab. Garut	703,843	1,021,651	145.15	28,233	2.76
Kab. Subang	608,652	864,651	142.06	25,974	3.00
Kab. Sumedang	514,423	728,722	141.66	18,225	2.50
Kab. Purwakarta	735,333	1.037,609	141.11	52,273	5.04
Kab. Banjar	283,041	397,956	140.60	14,704	3.69
Kab. Indramayu	600,112	697,756	116.27	21,540	3.09
Kota Tasikmalaya	1,956,317	2,010,358	102.76	66,754	3.32
Kab. Cianjur	944,743	890,147	94,22	12,117	1.36
Kab. Bandung	1,024,057	885,184	86.44	33,720	3.81
Kab. Bekasi	3,205,427	2,597,751	81.04	55,189	2.12
Kota Cimahi	1,245,093	913,262	73.35	12,506	1.37
Kab. Sukabumi	617,591	449,325	72,75	11,189	2.49

Kota Cirebon	4,497,185	3,246,946	72.20	160,047	4.93
Kota Sukabumi	1,466,497	1,043,562	71.16	24,290	2.33
Kab. Bogor	1,187,802	792,023	66.68	8,014	1.01
Kota Bekasi	2,090,062	1,392,213	66.61	20,330	1.46
Kab. Karawang	2,096,971	1,169,197	55.76	29,769	2.55
Kota Bandung	47,751,459	24,986,878	52.33	1,666,017	6.67
Kota Bogor	8,613,187	3,448,826	40.04	177,705	5.15
Kota Depok	2,752,375	662,501	24.07	15,178	2.29
Jawa Barat	83,538,136	50,520,164	60.48	2,481,869	4.91

Sumber: BI, Kantor Bank Indonesia Bandung Mei 2006

Dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan faktor yang sangat diandalkan dalam aktivitas perbankan. Sebagian besar laba yang dihasilkan oleh bank berasal dari kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk bunga kredit. Tetapi disamping memberikan sumbangan terbesar pada laba, kredit juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha perbankan yaitu dengan tingginya tingkat bunga kredit.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu ini antara lain seperti: 1) kesulitan memperoleh kredit; 2) keterbatasan modal; 3) sumber daya manusia yang rendah (terutama manajemen dan teknisi produksi); 4) kesulitan dalam pemasaran; 5) serta keterbatasan teknologi. Dengan perkataan lain masalah-masalah yang dihadapi banyak pengusaha kecil dan menengah bersifat multidimensi.

Masalah-masalah tersebut semakin terasa bagi pengusaha-pengusaha yang melayani pasar terbuka atau ekspor, lain halnya dengan pengusaha-pengusaha yang

hanya melayani pasar lokal di daerah yang relatif terisolasi. Di pasar terbuka para pengusaha berhadapan dengan produk-produk serupa dari pengusaha-pengusaha besar yang lebih unggul dalam banyak hal, maupun persaingan dari barang-barang impor. Bahkan di pasar ekspor, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah harus berhadapan dengan mitra mereka dari skala usaha yang sama dan lebih maju. Dalam kondisi pasar seperti ini, faktor-faktor seperti penguasaan teknologi dan informasi, modal yang cukup, termasuk melakukan inovasi dalam produk dan proses produksi, pembaharuan mesin dan alat-alat produksi dan untuk melakukan kegiatan promosi yang leluasa dan agresif, pekerja dengan ketrampilan yang tinggi, dan manajer dengan *entrepreneurship* dan tingkat ketrampilan yang tinggi dalam *business management* serta memiliki wawasan yang luas menjadi faktor-faktor yang sangat penting untuk mempertahankan tingkat daya saing global.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank BUMN yang sering menghadapi berbagai masalah dengan kredit. Kredit kepada pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu pada saat ini dan saat yang akan datang masih sangat potensial untuk dilirik oleh BRI Cabang Indramayu yang mayoritas masyarakatnya sebagai nelayan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kredit, modal, Sumber Daya Manusia, pemasaran dan teknologi terhadap kinerja pengusaha ikan yang merupakan nasabah BRI Cabang Indramayu. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Kredit, Modal, Sumber Daya**

Manusia, Pemasaran dan Teknologi Terhadap Kinerja Pengusaha (Studi pada Pengusaha Ikan Nasabah BRI Cabang Indramayu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang ada sebagai berikut:

1. Sejauhmana besarnya kredit dapat mempengaruhi kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.
2. Sejauhmana faktor modal dapat mempengaruhi kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.
3. Sejauhmana faktor SDM dapat mempengaruhi kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.
4. Sejauhmana faktor pemasaran dapat mempengaruhi kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.
5. Sejauhmana faktor teknologi dapat mempengaruhi kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mempelajari:

- 1) Pengaruh besarnya kredit terhadap kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu;
- 2) Pengaruh modal terhadap kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu;
- 3) Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu;
- 4) Pengaruh pemasaran terhadap kinerja pengusaha di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu;
- 5) Dan pengaruh teknologi terhadap kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.
- 6) Pengaruh variabel kredit; modal; Sumber Daya Manusia; pemasaran dan teknologi terhadap kinerja pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut, terutama dalam pengembangan dan pembinaan pengusaha ikan di Indonesia pada umumnya dan pengusaha ikan di Kecamatan Karangsong Kabupaten Indramayu pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam rangka pengembangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk membiayai usaha-usaha UMKM lainnya.

